

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

2.1. Kota Yogyakarta

2.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis Kota Yogyakarta antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}49'26''$ lintang Selatan dengan luas sekitar $32,5 \text{ Km}^2$ atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan, 614 rukun warga (RW), dan 2.523 rukun tetangga (RT). Dengan batas wilayah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

2.1.2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Pada sensus penduduk tahun 2010 di Kota Yogyakarta tercatat ada 388.657 jiwa. Adapun data penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2010

No.	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah (%)
1.	Laki-laki	189.167	48.67 %
2.	Perempuan	199.490	51.33 %
Jumlah		388.657	100.00 %

Sumber : BPS Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2011.

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Yogyakarta adalah 388.627 jiwa yang terdiri dari 189.144 jiwa penduduk laki-laki dengan prosentase 48.67% dan 199.483 jiwa penduduk perempuan dengan prosentase 51.33%. Jadi sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta adalah perempuan yaitu sebesar 51.33%.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Per Kecamatan Tahun 2010.

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Total	Kepadatan Penduduk
1.	Mantrijeron	2.61	15.190	16.077	31.267	11.980
2.	Kraton	1.40	8.329	9.142	17.471	12.479
3.	Mergangsan	2.31	14.375	14.917	29.292	12.681
4.	Pakualaman	0.63	4.157	4.799	9.316	14.787
5.	Gondomanan	1.12	6.095	6.934	13.029	11.633
6.	Ngampilan	0.82	7.600	8.720	16.320	19.902
7.	Wirobrajan	1.76	12.572	12.268	24.840	14.114
8.	Gedongtengen	0.96	8.177	9.008	17.185	17.901
9.	Jetis	1.70	11.451	12.003	23.454	17.796
10.	Tegalrejo	2.91	17.266	17.657	34.923	12.001
11.	Danurejan	1.10	9.020	9.322	18.342	16.675
12.	Gondokusuman	3.99	21.915	23.378	45.293	11.352
13.	Umbulharjo	8.12	37.114	39.629	76.743	9.451
14.	Kotagede	3.07	15.516	15.636	31.152	10.147
Jumlah		32.50	189.167	199.490	388.657	192.899

Sumber : BPS Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2011

Dapat dilihat dari banyaknya penduduk per kecamatan pada tahun 2010, kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang penduduknya paling banyak di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 76.743 jiwa. Sedangkan diposisi kedua yaitu kecamatan Gondokusuman sebanyak 45.293 jiwa. Dan kecamatan yang penduduknya paling sedikit adalah kecamatan Pakualaman yaitu hanya sebanyak 9.316 jiwa.

Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 19.902 jiwa/Km². Kecamatan ini mempunyai luas wilayah sebesar 0.82 km dan berpenduduk sebanyak 16.320 jiwa. Sedangkan kecamatan yang

kepadatan penduduknya paling kecil adalah kecamatan umbulharjo yaitu sebanyak 94.511 jiwa/Km². Meskipun kecamatan ini merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak namun karena wilayahnya luas yaitu sebesar 8.12 Km maka kepadatan penduduknya kecil. Berbeda halnya dengan Kecamatan Ngampilan, meskipun jumlah penduduknya relatif cukup besar akan tetapi karena luas wilayahnya sempit maka mengakibatkan kepadatan penduduknya besar.

Melihat kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta dan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara langsung maka dibutuhkan komponen yakni sumber daya manusia yang berada dan berdomisili di Kota Yogyakarta untuk memberikan suara mereka demi terciptanya suatu pemilu yang demokratis.

b. Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Dalam sebuah Negara diperlukan adanya data secara rinci terkait dengan usia rakyatnya, guna memudahkan dalam pencarian data atau keperluan lainnya. Adapun data penduduk menurut usia di Kota Yogyakarta yaitu :

Tabel 2.3**Penduduk Menurut Klompok Umur Dan Jenis Kelamin
di Kota Yogyakarta Tahun 2010**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	13.132	12.323	25.455
2.	5-9	12.849	12.162	25.011
3.	10-14	12.992	12.2338	25.230
4.	15-19	18.542	20.920	39.462
5.	20-24	24.146	25.395	49.541
6.	25-29	18.594	17.175	35.769
7.	30-34	14.907	14.739	29.646
8.	35-39	13.518	13.990	27.508
9.	40-44	13.047	14.410	27.457
10.	45-49	11.881	13.437	25.318
11.	50-54	10.847	11.839	22.686
12.	55-59	8.324	8.878	17.202
13.	60-64	4.864	5.822	10.686
14.	65-69	3.932	5.130	9.062
15.	70-74	3.063	4.476	7.539
16.	75+	3.561	5.953	9.514
17.	TT	968	603	1.571
18.	Jumlah	189.167	199.490	387.086

Sumber : BPS Kota Yogyakarta Dalam Angka 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas tidaklah sedikit. Dimana penduduk dengan usia 15-19 tahun sebanyak 39.462 jiwa, usia ini biasa dijadikan sebagai target pemilih pemula dalam suatu pemilu. Sedangkan penduduk dengan usia 20-69 tahun sebanyak 254.425 jiwa, kurun usia ini dianggap sebagai pemilih tetap atau pemilih mayoritas dalam suatu pemilu.

Sehingga penggolongan penduduk menurut usia tertentu dirasa penting dan sangat perlu untuk mengetahui jumlah penduduk

yang tergolong balita, anak-anak, muda hingga tua. Penggolongan seperti ini sangat dibutuhkan dalam sensus penduduk guna mengetahui berapa banyak pertumbuhan umur dalam satuan tahun. Selain itu juga sangat bermanfaat bagi suatu pelaksanaan pemilu. Dimana dengan pengelompokan usia, maka suatu timses akan dengan mudah memetakan target pemilih untuk menjadi massanya.

2.2. Kabupaten Sleman

2.2.1. Kondisi Geografi

a) Letak Wilayah

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Sleman



Sumber : Base Map DIY, Skala 1 : 25.000

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $110^{\circ}13'03''$ sampai dengan $110^{\circ}33'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}34'51''$ sampai dengan $7^{\circ}47'03''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Di

sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa lading dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak.

b) Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km².

Tabel 2.4.**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

No.	Kecamatan	Desa	Padukuhan	Luas Wilayah (km ²)
1	Moyudan	4	65	27,62
2	Minggir	5	68	27,27
3	Sayegan	5	67	26,63
4	Godean	7	77	26,84
5	Gamping	5	59	29,25
6	Mlati	5	74	28,52
7	Depok	3	58	35,55
8	Berbah	4	58	22,99
9	Prambanan	6	68	41,35
10	Kalasan	4	80	35,84
11	Ngemplak	5	82	35,71
12	Ngaglik	5	87	38,52
13	Sleman	6	83	31,32
14	Tempel	8	98	32,49
15	Turi	4	54	43,09
16	Pakem	5	61	43,84
17	Cangkringan	5	73	47,99
Jumlah/Total		86	1.212	574,82

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Provinsi D.I Yogyakarta

Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 km²), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 km²). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan).

c) Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.066.673 jiwa, terdiri atas 534.018 laki-laki dan 532.655 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.856 jiwa per km².

Tabel 2.5.

Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Km² menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman 2010

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Moyudan	27,62	30.092	1.090
2	Minggir	27,27	28.606	1.049
3	Sayegan	26,63	44.046	1.654
4	Godean	26,84	64.426	2.400
5	Gamping	29,25	94.883	3.244
6	Mlati	28,52	99.000	3.471
7	Depok	35,55	175.590	4.939
8	Berbah	22,99	49.646	2.159
9	Prambanan	41,35	45.811	1.108
10	Kalasan	35,84	74.450	2.077
11	Ngemplak	35,71	57.534	1.611
12	Ngaglik	38,52	99.387	2.580
13	Sleman	31,32	61.196	1.954
14	Temple	32,49	48.223	1.484
15	Turi	43,09	32.328	750
16	Pakem	43,84	33.896	773
17	Cankringan	47,99	27.560	574
Jumlah / Total		574,82	1.066.673	1.856

Sumber : Proyeksi dan Sensus Penduduk 2000 dan SUPAS 2005

Selama 4 tahun, penduduk yang datang sebanyak 73.659 orang, sedangkan penduduk yang pindah sebanyak 43.857 orang, Kelahiran yang terjadi selama 4 tahun sebanyak 38.413 jiwa sedangkan banyaknya penduduk yang meninggal 17.976 jiwa.

Tabel 2.6.
Mutasi Penduduk Kabupaten Sleman
Tahun 2006-2009

No.	Tahun	Mutasi				Pertambahan
		Datang	Pindah	Lahir	Mati	
1.	2006	15.911	8.820	8.685	4.315	11.461
2.	2007	17.774	10.986	9.622	4.556	11.854
3.	2008	22.134	12.544	9.139	4.341	14.388
4.	2009	17.840	11.507	10.967	4.764	12.536

Sumber : Kantor PP dan Capil

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Pendidikan

Ketersediaan sekolah pada jenjang SD, yaitu pada tahun 2009/2010 terdapat sebanyak 498 unit sekolah yang terdiri dari 381 SD negeri dan 117 SD swasta. Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 104 sekolah, yang terdiri 54 SMP negeri dan 50 SMP swasta. Pada jenjang SMA terdapat 45 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 28 SMA swasta. Kemudian pada jenjang perguruan tinggi terdapat 38 perguruan tinggi di kabupaten sleman dengan 33 perguruan tinggi swasta dan 5 perguruan tinggi negeri.

b. Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan sangat penting bagi warga Negara. Di kabupaten Sleman fasilitas kesehatan, antara lain puskesmas terdapat sebanyak 24 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman. Kemudian Rumah Sakit Swasta terdapat 9 rumah sakit, dan Rumah Sakit Pemerintah terdapat sebanyak 3 rumah sakit.

c. Peribadatan

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Sleman pada tahun 2009 mencatat sekitar 859.490 orang beragama islam, katholik sebanyak 63.589 orang, disusul oleh agama Kristen sebanyak 26.121 orang. Adapun penduduk beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.496 orang dan 913 orang. Banyaknya masjid yang berada di Kabupaten Sleman adalah 1.838 masjid. Kemudian gereja Kristen sebanyak 61 gereja, dan gereja Katholik sebanyak 27 gereja. Disusul berturut turut oleh tempat beribadat umat Hindu sebanyak 2 pura, dan umat Budha sebanyak 3 wihara.

2.3. Kabupaten Bantul

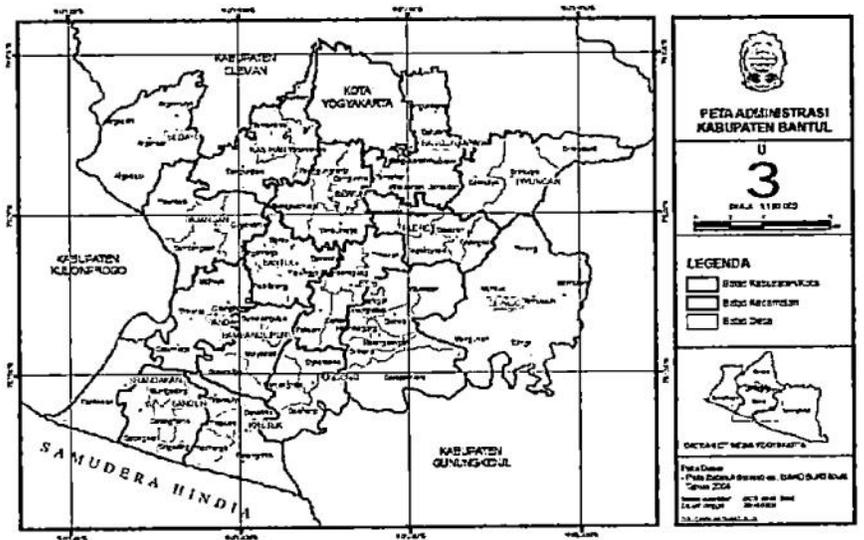
2.3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ}44'44''$ - $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah terselatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan jalur utama lalu lintas antar daerah terletak pada bagian Utara wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini mengakibatkan percepatan perkembangan wilayah di bagian Utara lebih pesat dari pada bagian lain di Kabupaten Bantul.

Gambar 2.2.

Peta Kabupaten Bantul



Sumber : Base Map DIY, Skala 1 : 180.000

2.3.2. Kondisi Demografi

a) Kepadatan Penduduk geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.7**Jumlah penduduk berdasarkan tingkat kepadatan penduduk.**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah penduduk			Kepadatan/km2
			2007	2008	2009	2007
1.	Srandakan	18.340	31,133	31,240	31,322	1697,55
2.	Sanden	23.270	34,352	34,513	36,370	1476,24
3.	Kretek	25.500	31,704	31,980	32,161	1243,29
4.	Pundong	23.760	32,501	32,690	32,887	1370,41
5.	Bb.lipuro	22.820	43,996	44,368	44,629	1927,96
6.	Pandak	24.290	49,993	50,892	51,256	2007,87
7.	Bantul	33.190	60,799	61,623	62,013	1831,85
8.	Jetis	21.990	51,083	51,693	51,969	2323,01
9.	Imogiri	25.600	58,482	59,087	61,290	2284,45
10.	Dlingo	57.810	38,096	38,402	42,130	658,98
11.	Pleret	56.340	34,600	41,389	41,848	614,13
12.	Piyungan	21.280	38,911	39,759	40,621	1828,52
13.	Banguntapan	33.120	88,236	89,667	90,477	2664,13
14.	Sewon	26.290	79,382	80,561	81,151	3019,48
15.	Kasih	26.760	81,193	89,800	91,849	3034,12
16.	Pajangan	32.380	31,644	31,996	33,079	977,27
17.	Sedayu	34.110	45,787	46,546	46,784	1342,33
Jumlah		506.850	833,962	856,206	871,836	3127,886

Sumber: BPN Kabupaten Bantul (diambil dari tugas matakuliah manajemen perkotaan pada tanggal 12 juni 2012).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas dibandingkan kecamatan lainnya adalah kecamatan Dlingo dengan luas wilayah 57.810 Km² dan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan dengan luas wilayah 18.340 Km². Jumlah penduduk dari tahun 2007, 2008, dan 2009 mengalami peningkatan pada sebagian besar kecamatan kecuali kecamatan Pundong yang

mengalami penurunan yaitu dari 33,105 menjadi 32,501. Demikian juga pada kepadatan penduduk, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada kecamatan Pundong 1393,31 Km² menjadi 1370,41 Km² dan Pandak 2009,92 Km² menjadi 2007,87 Km².

b) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sampai dengan tahun 2009, penduduk Kabupaten Bantul berjumlah 922.566 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tahun 2005 – 2009 menunjukkan pola penambahan yang linier.

Angka pertumbuhan penduduk menurun dari 2,19% pada tahun 2005 dan pada tahun 2009 sebesar 1,41% maka kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh adanya migrasi ke luar daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk alamiahnya. Kondisi ini dijumpai terutama pada wilayah tengah Kabupaten Bantul. Hal seperti ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak dapat lagi menggantungkan hidupnya di daerahnya sendiri. Dengan bertambahnya tekanan penduduk akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dan pelayanan yang harus disiapkan. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul

juga dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar (migrasi).

c) Penduduk Miskin

Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tabel 6: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2005 – 2009.

No.	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Jiwa Miskin	166,220	288,035	221,757	186,418	149,159
2.	Persentase	19,76	32,58	24,72	20,49	16,17
	Perubahan		64,88%	-24,13%	-17,11%	-21,08%

Sumber: BKK PP KB Kabupaten Bantul, 2010.

Perubahan penduduk miskin pada tahun 2005 mencapai 166,220 jiwa atau sekitar 20,90% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul, kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 64,88% di tahun 2006, kenaikan tersebut disebabkan adanya gempa bumi yang menyebabkan kehilangan sebagian mata pencahariannya. Akan tetapi, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh efektivitas program-program yang telah dilakukan.

2.3.3. Pemerintah Daerah

Tabel 2.9.
Jumlah Kecamatan, Desa Dan Pedukuhan Di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pedukuhan	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	kasihan	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	506,85

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaen Bantul (diambil dari tugas matakuliah manajemen perkotaan pada tanggal 12 juni 2012).

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Struktur

organisasi kabupaten Bantul terdiri dari 13 Sekertariat Daerah, 3 BUMD, 6 bank, 5 BUMN, 7 Kantor, 3 badan, 14 Dinas, dan 17 Kantor Kecamatan.

Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan utara, daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat serta daerah pantai yang terletak pada bagian selatan. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu Sungai Opak, Sungai Oya dan Sungai Progo. Ketiga sungai ini dimanfaatkan untuk pasokan irigasi, air minum serta tambang pasir dan batu.

2.3.4. Lingkungan Hidup

a) Air Limbah

Penanganan air limbah di Kabupaten Bantul belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang potensial menghasilkan limbah cair, ternyata sebagian besar belum memiliki instalasi pengolahan limbah (Waste Water Treatment). Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah cair di Kabupaten Bantul antara lain dari bidang industri dan bidang kesehatan, di samping itu kegiatan perumahan juga berpotensi menghasilkan limbah domestik.

Kegiatan bidang industri dan bidang kesehatan yang memiliki instalasi pengolahan limbah masih sangat kecil (kurang dari 20%), sedangkan kegiatan perumahan (komplek perumahan) belum ada yang memiliki unit pengolahan limbah secara terpadu (comunal sistem), sebagian besar masih menggunakan sistem pengolahan dengan sumur-sumur peresapan individu yang sangat rawan mencemari air tanah. Di sisi lain di Kabupaten Bantul terdapat sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat (IPAL Sewon) yang diperuntukan untuk menangani limbah di Kota Yogyakarta, Sebagian Kabupaten Sleman dan sebagian Kabupaten Bantul, namun karena faktor kemiringan lereng (slope) dan jumlah pipa lateral, maka sampai saat ini hanya sebagian kecil yang bisa mengakses sistem tersebut.

b) Persampahan

Produksi sampah/timbulan sampah di Kabupaten Bantul mencapai 614 m³/hari sedangkan volume sampah yang terkumpul mencapai 80 m³/hari atau sebesar 13%. Komposisi timbulan sampah sebagian besar adalah sampah organik sebanyak 70% (56 m³/hari) yang rentan mengalami pembusukan dan sisanya sampah non-organik sebanyak 30% (24 m³/hari). Selanjutnya berkait dengan kemampuan dalam pelayanan sampah dapat dilihat pada:

Tabel 2.10.
Sektor dan Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2009

No.	Sektor Pelayanan	Total Area (Ha)	Area Terlayani (Ha)	Tingkat Pelayanan (%)
1.	Banguntapan	777	120	15,4
2.	Kasih	1321	400	30
3.	Sewon	744	100	13,4
4.	Piyungan	18	9	50
5.	Pleret	190	40	21
	Total	3.050	669	21,19

Sumber: DPU Kabupaten Bantul, 2010.

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dilakukan mulai dari pengumpulan/pengangkutan sampah perumahan, pasar, dan sumber - sumber sampah lainnya. Untuk pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah TPA Piyungan, dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kerjasama ini dalam bentuk sharing pembiayaan operasional pengolahan sampah di TPA Piyungan.

Sesuai dengan perencanaan maka usia pakai TPA Piyungan hanya akan mampu menampung sampah sampai tahun 2012, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk memperpanjang umur TPA atau pembangunan TPA baru. Dari sisi manajemen pengelolaan, TPA Piyungan dikelola secara bergiliran antar pemerintah kabupaten/kota, sedangkan biaya pengelolaan ditanggung bersama

pemerintah kabupaten/kota yang besarnya proporsional sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Dari aspek lingkungan, operasional TPA Piyungan memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif antara lain dengan berkembangnya ternak di lokasi TPA yang mencapai 700 ekor sapi di samping itu tumbuh kegiatan pemanfaatan sampah (recycle dan reuse) oleh pemulung yang mencapai lebih dari 200 orang. Dampak negatif yang timbul dan belum tertangani secara optimal antara lain adalah kerusakan jalan Ponegaran dengan Desa Ngablak yang selalu dilewati truk pengangkut sampah, pencemaran air lindi (leachate) ke badan air, pencemaran udara/bau, gangguan transportasi dan kesulitan mendapatkan tanah urug untuk penutup (land fill). Dalam jangka panjang permasalahan-permasalahan tersebut cenderung akan meningkat dan diperlukan penanganan yang optimal.

B. Gambaran Umum Terbentuknya Kerjasama Antar Daerah

Kartamantul

1. Sejarah Terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber)

KARTAMANTUL

Latar Belakang terbentuknya Sekber KARTAMANTUL yaitu mulai dari tahun 1990, ada inisiasi YUDP (*Yogyakarta urban Depeloment Project*) adalah Suatu kesepakatan dimana kita ingin menciptakan suatu wilayah perkotaan yang terpadu, tahun 1990 pada

saat itu ada banyak hal yang diidentifikasi yang pada intinya adalah bagaimana kita mensinkronisasi dan mengharmonisasikan mengenai infrastruktur perkotaan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Bantul. Dari kondisi itu kemudian muncul sebuah keinginan untuk membuat instansi baru yang bisa menjembatani kegiatan harmonisasi dan keselarasan institusi itu yang akhirnya disebut dengan kerjasama KARTAMANTUL.

Sejak tahun 1990 dan itu diinisiasi awal dibidang pengelolaan sampah karna kita dulu ada masalah terkait orang yang membuat sampah disungai, yaitu orang yogyakarta begitu yang mendapat nasib adalah Bantul, akhirnya bersepakat punya satu TPA digunakan oleh tiga daerah sejak tahun 1990 kita dibangun kemudian dioperasikan mulai tahun 1995.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ferry Anggoro sebagai *office manager*, pada senin, 05 Maret 2012 di kantor KARTAMANTUL). TPA itu lima tahun pertama dibiayai oleh propinsi tapi sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini pembiayaan operasional TPA itu ditanggung oleh ketiga daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan jumlah volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan itu yang jadi timbal balik.³³

³³ Hasil wawancara dengan bapak Ferry Anggoro sebagai *office manager*, pada senin, 05 Maret 2012 di kantor(Sekber).

Tabel 2.12.
Jumlah Volume Sampah Daerah KARTAMANTUL

No.	Kabupaten/kota	Vol. Sampah (kg)	Persen	Rupiah (Rp)
1.	Yogyakarta	111.432.304,35	78,46	1.853.113.821
2.	Sleman	21.362.669,75	15,04	355.260.163
3.	Bantul	9.237.911,24	6,50	153.626.016
	TOTAL	142.032.885,33	100,00	2.362.000.000

Sumber : Kontribusi biaya operasi dan pemeliharaan TPA

Piyungan tahun anggaran 2008. Dalam R. Ferry Anggoro (2008 : 105).

Ketika sebuah kota berukuran cukup kecil dan hanya mencakup bagian kecil batas administratif, maka pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan menjadi isu yang sederhana, ini berlawanan dengan masalah pengelolaan yang rumit yang muncul dari pembangunan suatu kota yang areanya melebihi batas administratif. Berdasarkan pengamatan empiris, tercatat bahwa sistem yang lintas batas selalu ada sebagai karakter utama pengelolaan perkotaan, khususnya di Wilayah Metropolitan. Sebagai contoh, sungai yang mengalir melintasi sebelah hulu batas administrasi suatu wilayah ke sebelah hilir dari wilayah yang lain. Demikian juga halnya untuk sistem jalan, transportasi, dan air limbah, yang selalu terhubung dengan daerah lain diluar administratif. Dengan tanpa melihat batas wilayah administratif, prasarana dan sarana perkotaan akan memiliki kinerja optimal jika dikelola sebagai satu sistem.

2. Proses Kemunculan Sekertariat Bersama (Sekber)

Pada kondisi tersebut, dengan tidak adanya wadah yang mengintegrasikan pengelolaan prasarana perkotaan, telah mendorong tiga pemerintahan daerah yang wilayahnya membentuk Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. Membuat suatu wadah koordinasi untuk memecahkan situasi ini, mereka telah membentuk Sekertariat Bersama sebagai suatu metode untuk mengoptimalkan keterpaduan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan Wilayah perbatasan. Bagaimana suatu gagasan menjadi suatu kenyataan tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah, minat dan pemahaman yang sama tentang pendekatan sistem dalam pengelolaan prasarana perkotaan.

3. Tujuan Terbentuknya Kerjasama

Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar femampaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efesian serta memenuhi standar teknis lingkungan. Ruang Lingkup dari Kerjasama ini adalah:

- a. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana TPA sampah bagi wilayah perkotaan Yogyakarta.
- b. Pengelolaan TPA sampah yang meliputi; Pengelolaan Oprasional dan Pemeliharaan, Pengembangan Prasarana dan Sarana, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Penetapan dan Pendapatan

Personil, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembiayaan dan Pengembangan Prasarana.

4. Visi

Menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerja yang setara, adil, partisipatif, transparan dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang didukung oleh sarana - prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi.

5. Misi

Sekretariat Bersama Kartamantul memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil.
- b. Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan.
- c. Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi.
- d. Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan.
- e. Membangun jaringan kerja yang kuat.
- f. Memberikan inisiasi perubahan.
- g. Memberikan rekomendasi kebijakan.

6. Kunci Sukses

- a. Motivasi dan tuntutan kebutuhan kerjasama meningkatnya komitmen kerjasama.
- b. Budaya saling toleransi, musyawarah dan kesetaraan serta kebersamaan menjadi landasan utama.

- c. Karakteristik wilayah (secara geografis) menyatu dalam suatu sistem yang fungsional.
- d. Adanya dukungan pemerintah propinsi.
- e. Adanya dukungan eksternal (Donor, PT dan lain-lain).
- f. Adanya obyek riil kerjasama sektoral (TPA, IPAL).
- g. Kepemimpinan organisasi.
- h. Kebijakan dan peraturan yang mendukung untuk kepentingan bersama.
- i. Manajemen yang tertata dalam sekretariat bersama.
- j. Keterlibatan masyarakat LSM dan stakholder yang tinggi.

7. Tantangan

- a. Keberlanjutan fungsi dan peran dalam peningkatan pelayanan publik.
- b. Pengembangan kelembagaan stabilitas dan kapasitas pengurus, kewenangan, stabilitas anggaran operasional, legitimasi dari publik.
- c. Dukungan legalitas dan dukungan politik
 - 1) Kebijakan pusat: Peraturan Pemerintah tentang kerjasama Antar Daerah.
 - 2) Kebijakan Propinsi: Perda, RT/RW Kawasan Perkotaan.
 - 3) Dukungan yang optimal DPRD.
 - 4) Jaringan antar stakholder.

8. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah perangkat organisasi yang diperlukan untuk sistem pengelolaan sampah, dimana luas dan kompleksnya sistem maka semakin membutuhkan perangkat tersebut. Dalam struktur organisasi pengelola harus dapat digambarkan aktifitas utama dalam sistem pengelolaan dan pengendalian atau pengawasan terutama untuk bentuk Dinas Persampahan Daerah tersendiri. (Nasrullah, 2001).

Struktur organisasi tidak cukup mencerminkan aktivitas atau interaksinya, sehingga perlu dirancang tata laksana kerjanya. Tata laksana kerja mendefenisikan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta bentuk interaksi antar unit atau komponen organisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tata laksana kerja yang baik adalah menciptakan pembebanan yang merata, pendelegasian wewenang yang proporsional dan berimbang, birokrasi yang jelas dan terukur, dan penyusunan form-form pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang baku.

Struktur organisasi badan pengelolaan sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. Beban kerja dan pengelompokkan kerja yang dilaksanakan.
- b. Menciptakan pengendalian internal.
- c. Menciptakan beban kerja yang seimbang.

- d. Rentang kendali yang sesuai dengan batas kemampuan.
- e. Penamaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dalam Pengelolaan Sampah

KARTAMANTUL yaitu sebagai berikut:³⁴

Pengarah

- Ketua : Sekda Kabupaten Bantul
- Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
- Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul

Anggota Tim Pengarah
<ul style="list-style-type: none"> • Sekda Kota Yogyakarta • Sekda Kabupaten Sleman • Sekda Kabupaten Bantul • Kepala Bappeda Kota Yogyakarta • Kepala Bappeda Kabupaten Sleman • Kepala Bappeda Kabupaten Bantul • Kepala Dinas/Instansi terkait

Anggota Tim Teknis
<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kabupaten/Kota • Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta • Dinas Kimpraswilhub Kabupaten Sleman • Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman • Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta • Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota • PDAM Kabupaten/kota • KPDL Kabupaten • Bappedal Kabupaten Bantul • BPKD, BPKKD, Keuangan • Bagian Hukum, Tata Pemerintahan, Organisasi.

Operasional

- Office Manager : R. Ferry Anggoro. S
- Asisten Teknis : Nasa Ujiarto Aji
- Asisten Administrasi : Elyana Wiwik Setyanti

³⁴ Profil Kelembagaan Sekber KARTAMANTUL. 2012.

9. Bentuk Kerjasama Daerah KARTAMANTUL

- a. Sektor persampahan
- b. Sektor Air Limbah
- c. Sektor Air Bersih
- d. Sektor Jalan
- e. Sektor Drainase
- f. Sektor Transportasi
- g. Tata Ruang Kota

10. Program Kerjasama KARTAMANTUL

Menurut Andri Tri Kuncoro dan Bambang Sigap Sumantri (2008) program kerjasama KARTAMANTUL yang terkait dengan kerjasama pada sektor persampahan yaitu:

- a. Pengelolaan TPA Piyungan.
- b. Biaya operasional dan pemeliharaan peningkatan kinerja pengelolaan.
- c. Penanganan sampah ilegal.
- d. Implementasi teknologi pengolahan sampah.
- e. Pengembangan kapasitas dan penanganan kerusakan infrastruktur TPA Piyungan.

Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama program-program di negara-negara berkembang

seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya.

Khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara berkembang. Salah satu contoh sukses adalah Zabbaleen di Kairo, yang telah berhasil membuat suatu sistem pengumpulan dan daur ulang sampah yang mampu mengubah/memanfaatkan 85% sampah yang terkumpul dan mempekerjakan 40.000 orang.

Menurut M. Gempur Adnan, Deputy II Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup, mengatakan sebagai pengganti sistem penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir yang banyak diprotes masyarakat, pemerintah kini mendorong penerapan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reuse, reduce, dan recycle) pada skala kota. Program pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip penggunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (reuse, recycle, reduce/3R) ini bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan prinsip tersebut, jumlah sampah yang dibuang ke TPA tinggal 35 persen sehingga meringankan beban TPA sekaligus memperpanjang masa pakaiannya.